

KONFLIK DI INDONESIA PROBLEM DAN PEMECAHANNYA Ditinjau dari Perspektif Sosiologis

Bernard Raho, SVD

1. Pendahuluan

Dalam makalah yang pertama ini¹, saya diminta untuk memberikan sebuah masukan mengenai peta situasi konflik di Indonesia, berikut akar masalah, dan upaya yang telah dilakukan untuk menciptakan rekonsiliasi. Guna membahas tema itu, saya memberikan sedikit latar belakang mengenai situasi Indonesia yang sejak beberapa tahun terakhir ini diterpa oleh berbagai konflik dan kerusuhan yang bekepanjangan di berbagai tempat di Indonesia. Konflik-konflik itu tampak dalam kerusuhan yang berhubungan dengan SARA, kerusuhan-kerusuhan karena pertikaian politik, atau konflik karena ingin melepaskan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan latarbelakang tersebut di atas maka pokok pembicaraan kita dalam makalah ini adalah *Konflik di Indonesia: Problem dan Pemecahannya* ditinjau dari perspektif sosiologis. Uraian tentang tema ini dibagi ke dalam beberapa bagian. Bagian pertama berisi uraian tentang potret konflik di Indonesia. Di dalam bagian ini akan dideskripsikan satu-dua contoh dari konflik yang pernah terjadi di Indonesia pada umumnya dan di NTT pada khususnya. Lalu, bagian kedua berisikan analisis

¹ Makalah ini disampaikan dalam lokakarya Kerasulan Kitab Suci, Regio Gerejawi Nusa Tenggara di Mataloko, April 2001.

sosiologis tentang konflik. Di dalam bagian ini akan dikemukakan beberapa pandangan atau penjelasan yang berasal dari sosiologi mengenai fenomena konflik itu. Kemudian bagian ketiga berisikan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi masalah-masalah sekitar konflik itu. Akhirnya seluruh uraian ditutup dengan sebuah kesimpulan umum yang mengutarakan akar masalah dan langkah yang bisa ditempuh untuk keluar dari masalah-masalah konflik itu.

2. Potret Konflik-konflik Di Indonesia

Konflik antara suku, ras, agama, dan antargolongan di Indonesia mulai sangat terasa ketika Soeharto turun dari panggung kekuasaannya. Konflik-konflik itu tidak saja meningkat dalam intensitasnya tetapi juga dalam hal penyebarannya. Hampir setiap pulau di wilayah Nusantara ini pernah dilanda kerusuhan atau kekerasan. Misalnya konflik Aceh di Sumatra, pembakaran gereja-gereja dan tragedi malam natal di Jawa, konflik Sambas dan Sampit di Kalimantan, konflik Poso di Sulawesi, konflik Maluku, konflik Papua, kerusuhan Mataram di Nusa Tenggara Barat, dan kerusuhan Borong dan Ruteng di NTT, dan tentu masih banyak kerusuhan lain di berbagai wilayah Nusantara. Guna menyegarkan kembali ingatan kita akan konflik-konflik yang pernah terjadi itu, saya ingin membeberkan kembali beberapa konflik berdarah khususnya yang terjadi dalam dua tahun terakhir di hampir setiap pulau besar di Indonesia.

2.1. Konflik Maluku

Dari sekian banyak konflik yang disebutkan di atas, konflik yang barangkali paling panjang dan meletihkan serta memakan banyak korban adalah konflik di Maluku. Kerusuhan di Maluku

meledak untuk pertama kalinya pada tanggal 19 Januari 1999. Pada waktu itu terjadi perkelahian massal antara warga kampung Batumerah Atas yang 90% penduduknya beragama Kristen dan warga kampung Batumerah Bawah yang 100% penduduknya beragama Islam. Kerusuhan itu berawal dari perselisihan antara pribadi, sopir angkutan kota dan penumpang yang berbeda agama. Setelah itu kerusuhan merembet ke tempat-tempat lain, seperti pulau Haruku hingga pembentukan Kodam XVI/Pattimura 15 Mei 1999.²

Dari bulan Mei 1999 hingga awal Juli 1999 keadaan relatif aman. Tetapi pada tanggal 24 Juli 1999 kerusuhan kembali berkobar di Ambon. Kerusuhan yang kedua ini dipicu oleh kerusuhan massal yang terjadi di Saparua beberapa hari sebelumnya. Korban pun berjatuhan, sebanyak 21 orang tewas dan 118 luka-luka. Pada waktu itu, warga Islam menuduh pihak keamanan bersikap memihak umat Kristen sehingga banyak korban yang berjatuhan berasal dari pihak Islam. Beberapa bulan kemudian, tepatnya tanggal 26 Desember 1999, sehari sesudah umat Kristen merayakan Natal, pihak Islam membakar Gereja Silo, yakni gereja tertua di Ambon dan perkampungan-perkampungan Kristen di kota Ambon. Peristiwa tersebut disiarkan oleh RRI dan TVRI sehingga membangkitkan amarah orang-orang Kristen. Keesokan harinya umat Kristen membalas serangan kelompok Islam itu dengan membakar lima mesjid di Ambon.³

Pada saat-saat awal, ketika Ambon dilanda kerusuhan, provinsi Maluku Utara relatif aman. Tetapi kerusuhan mulai

² "Bumi Seribu Pulau dan Beribu Mayat" dalam *TEMPO*, 23 Januari 2000, hlm. 24-25.

³ *Ibid.*

meledak pada wilayah tersebut ketika Malifut (sebelah utara kota Ternate) diresmikan sebagai kecamatan. Sebelas desa asli yang semuanya beragama Kristen menolak penggabungan 16 desa Muslim yang adalah pendatang ke dalam kecamatan itu. Apalagi ketika warga Muslim itu ditempatkan pada lokasi pertambangan emas. Warga Kristen melakukan protes keras. Tetapi protes mereka diabaikan. Beberapa hari kemudian warga Muslim menyerang 2 desa dan membakar 5 gereja. Korban yang tewas 7 orang. Sebagai balasan warga Kristen dari 16 desa balik menyerang warga-warga Muslim. Enam belas desa Muslim dihancurkan dan sekitar 16.000 orang mengungsi ke Ternate dan Tidore. Di kedua pulau terakhir ini kebanyakan penduduk beragama Islam sehingga orang-orang Kristen yang menghuni pulau ini menjadi sasaran perburuan warga Muslim sehingga sekitar 12.000 warga Kristen mengungsi ke Bitung, Manado, dan kecamatan Tabelo di Halmahera Utara.⁴

Kerusuhan Ambon masih terus berlanjut. Kerusuhan terbesar yang terakhir terjadi Juni tahun 2000. Dalam kerusuhan itu, dua desa Kristen yakni Rumahtiga dan Poka yang terletak di pinggir kota Ambon dan yang kebanyakan penduduknya beragama Kristen digempur rata tanah oleh laskar putih (istilah untuk Islam). Bersamaan dengan itu, Universitas Pattimura disapu-bersih. Tujuh orang tewas, puluhan luka-luka, 12.000 warga mengungsi, 14 gereja dan 4.000 rumah penduduk terbakar. Keesokan harinya, giliran desa Waai Lusung – juga desa Nasrani di Ambon – diluluh-lantakkan. Tujuh belas warga tewas dan 400 rumah penduduk dibakar.⁵

⁴ *Ibid.*

⁵ “Maluku Darurat Kian Gawaf” dalam *TEMPO*, 16 Juli 2000 hlm. 32.

Demikianlah gambaran singkat mengenai konflik yang terjadi di Ambon dan Maluku Utara yang menelan puluhan ribu korban, baik warga Kristen maupun warga Islam.

2.2. Konflik Aceh

Konflik di Aceh yang sudah berlangsung lama sebetulnya merupakan hasil akumulasi ketidakpuasan yang bertumpuk-tumpuk selama bertahun-tahun. Aceh adalah sebuah provinsi yang kaya raya karena sumber alamnya yang banyak. Tahun 1961, sebuah perusahaan minyak Kanada menemukan ladang minyak di kabupaten Aceh Timur dan menggali 450 sumur minyak. Kemudian di Aceh Utara ditemukan sumber gas alam (LNG) yang kemudian dikelola oleh perusahaan Mobil Oil. Kedua pertambangan itu menyumbang 30% dari seluruh ekspor minyak dan gas di Indonesia. Selain itu di Aceh masih terdapat pabrik pupuk dan kertas pembungkus semen. Pada tahun 1983 Aceh menyumbang 11% dari seluruh eksport Indonesia.⁶

Dengan harta karun yang berlimpah itu, di antara 27 Provinsi Indonesia pada waktu itu, Aceh adalah provinsi ketujuh termiskin. Survey BPS (Biro Pusat Statistik) 1993 menunjukkan bahwa 40% dari 5.643 desa di Aceh hidup di bawah garis kemiskinan. Hanya 10% desa menikmati aliran listrik. Keadaan diperburuk lagi karena pertumbuhan penduduk dari 1974-1987 adalah 50%. Sementara itu pembangunan pabrik pupuk menggeser keluarga-keluarga setempat dan ribuan pendatang dari luar daerah yang kurang peduli dengan adat istiadat Aceh membanjiri Aceh. Friksi dan pembenturan nilai antara penduduk asli dan pendatang menjadi tak terelakkan. Para pendatang hidup bermewah-mewah

⁶ "Duduk Perkara Aceh" dalam *TEMPO*, 10 Desember 2000, hlm. 78.

di tengah-tengah kemiskinan penduduk asli. Limbah industri mencemari tanah dan masuk ke sumur-sumur penduduk. Polusi meluas ke laut dan merusak lahan nelayan. Proses pemiskinan berlanjut terus dan orang Aceh menjadi orang asing di negerinya sendiri. Semua itu menimbulkan ketidakpuasan di dalam diri orang-orang Aceh.⁷

Pemberontakan di Aceh sebetulnya sudah dimulai tahun 1950 ketika status Aceh sebagai Provinsi dicabut dan dimasukkan ke dalam Provinsi Sumatera Utara. Kekecewaan atas perlakuan semacam itu membawa Aceh kepada pemberontakan pada tahun 1953 di bawah pimpinan Daud Beureuch. Operasi militer dari Jakarta berlangsung selama 4 tahun dan tidak berhasil mengalahkan Aceh sehingga tahun 1957 Jakarta mengembalikan status provinsi kepada Aceh dan tahun 1959 Aceh diberi status daerah istimewa. Aceh coba memberi isi kepada status daerah istimewa itu dengan meminta memberlakukan syariat Islam di wilayahnya dan mengintegrasikan sekolah-sekolah sekular ke dalam sekolah-sekolah Islam tetapi usaha itu ditolak oleh pemerintah pusat zaman Orde Baru yang menekankan keseragaman. Pelecehan Aceh terus berlanjut. Para murid dilarang memakai jilbab demi keseragaman secara nasional. Ted Robert dalam *Why Men Rebel* seperti yang dikutip oleh Mingguan TEMPO menulis bahwa orang akan berontak jika *way of life*-nya terancam oleh perkembangan baru. Orang Aceh telah kehilangan sumber alamnya, mata pencahariannya, gaya hidupnya, suaminya, anak-anaknya, dan harapan.⁸

Selama tahun 1999, berdasarkan data KONTRAS, jumlah orang yang mati terbunuh di Aceh adalah 416 dibandingkan

⁷ *Ibid.* hlm. 79.

⁸ *Ibid.*

dengan 33 orang dari ABRI, yang ditangkap dan ditahan 293 orang, yang hilang 101 orang, dan yang disiksa adalah 801 orang. Selama DOM diberlakukan di Aceh, khususnya di kabupaten Aceh Utara, Aceh Timur, dan Pidie ada 1.321 orang yang terbunuh, 1.958 yang hilang, 3.430 orang yang disiksa belum terhitung korban yang diperkosa dan wanita-wanita yang menjadi janda serta anak-anak yang menjadi yatim piatu.

2.3. Konflik Papua

Keinginan Irian Jaya atau yang sekarang disebut Papua untuk melepaskan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia bisa ditelusuri sejak bergabungnya provinsi tersebut ke dalam negara kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 1 Mei 1963. Tetapi upaya untuk menjadi negara sendiri itu pelan-pelan redup selama masa Orde Baru. Pada saat ini, ketika Soeharto tidak berkuasa lagi perjuangan untuk membentuk negara sendiri semakin kuat. Perjuangan itu kelihatan mulai menampakkan hasil ketika mereka mulai berani-berani mengibarkan Bendera Bintang Kejora. Nah tegal dinaikkannya bendera Bintang Kejora inilah yang menimbulkan berbagai kerusuhan di Papua.

Kerusuhan pertama terjadi di Timika tanggal 2 Desember 1999. Pada waktu itu, aparat keamanan secara paksa menurunkan bendera Bintang Kejora yang diprotes oleh massa. Protes massa itu ditanggapi oleh tentara dengan melepaskan tembakan-tembakan. Tidak jelas berapa korban yang jatuh. Kemudian menyusul kerusuhan yang kedua di Nabire. Dalam kerusuhan tersebut terjadi bentrokan antara polisi melawan satuan petugas Papua. Sepuluh orang satgas Papua yang tertembak dan dua di antaranya tewas. Kerusuhan menyebar ke Sorong pada tanggal 20 Agustus 2000. Kerusuhan Sorong juga terjadi karena ada bentrokan antara satgas Papua dan Brimob. Dalam kerusuhan

itu 3 orang satgas Papua tewas, 12 luka-luka, dan 23 orang ditangkap. Dua minggu kemudian bentrokan terjadi lagi di Manokwari antara Brimob dan massa. Satu orang warga sipil luka berat dan dua orang polisi babak belur digebuk massa. Seminggu kemudian, yakni tanggal 12 September 2000 kerusuhan meledak lagi di Hamadi, kecamatan Jayapura Selatan. Untunglah tidak ada korban yang jatuh.⁹

Kerusuhan di Papua memuncak ketika terjadi tragedi Wamena akhir Oktober 2000. Kerusuhan bermula dari apel pagi anggota Polres Jayawijaya, Wamena. Kapolres Jayawijaya memberi perintah kepada satuan anggota kepolisian untuk menurunkan bendera Papua, Bintang Kejora, yang dikibarkan pada hampir setiap sudut kota. Bendera Kejora dipandang sebagai cerminan kemerdekaan Papua. Usai apel, pak Kapolres bersama pasukan, bersama satu pleton pasukan pengendalian massa dan satu pleton pasukan anti huru-hara Brimob berkeliling dari satu tempat ke tempat lain untuk menurunkan bendera Bintang Kejora. Mula-mula, gerakan mereka tidak mendapat hambatan. Tetapi kemudian mereka dihadang oleh 50 orang satgas Papua dan warga Papua. Wajah mereka garang, beringas, dan marah. Konflik menjadi tak terhindarkan. Apalagi setelah Kapolres melepaskan tiga tembakan peringatan ke udara. Situasi menjadi tak terkendali. Maka bentrokan fisik menjadi tak terelakkan dan korban pun berjatuh. Jumlah korban yang jatuh adalah 30 orang dan yang terluka adalah 45 orang.¹⁰

⁹ "Luka Wamena Salah Siapa" dalam *TEMPO*, 22 Oktober 2000, hlm. 22.

¹⁰ *Ibid.* hlm. 22-23.

Tanggal 1 Desember 2000 yang lalu tersiar berita bahwa Papua akan memproklamkan kemerdekaannya. Papua memang tidak jadi merdeka tetapi bukan berarti tidak ada korban yang jatuh. Kerusuhan terjadi ketika Satgas dan warga Papua menaikkan lagi bendera Bintang Kejora sekalipun diperintahkan untuk diturunkan. Kemarahan massa menjadi-jadi ketika pemimpin mereka ditangkap dan ditahan. Karena itu, massa melempar aparat. Sekalipun mendapat tembakan peringatan, massa tetap tidak bergeming. Malah tindak kekerasan semakin menjadi-jadi. Maka korbanpun berjatuhan. Enam orang tewas diterjang peluru dan massa melakukan perusakan di mana-mana.¹¹

2.4. Kerusuhan Poso¹²

Kerusuhan di Poso terjadi pada tanggal 17 April 2000. Pada waktu itu dua pemuda pemabuk dari kampung berbeda – satunya Islam dan lainnya Kristen – terlibat dalam perkelahian dengan alasan yang tidak jelas. Keduanya kembali ke kampung masing-masing dan melaporkan apa yang terjadi. Maka warga dari kedua kampung itu saling menyerang. Aksi bentrok itu meluas sampai ke wilayah-wilayah di luar Poso. Dalam kerusuhan itu 3 orang tewas, 4 orang luka-luka, 267 rumah terbakar, 5 motor hangus, dan 3 gereja hancur. Kerugian ditaksir 10 miliar.

Sebagai pembalasan atas peristiwa itu maka pada tanggal 23 Mei 2000 sekitar 20 orang berpakaian mirip ninja dan berikat kepala merah (lambang kelompok Kristen) membuat keributan di salah satu jalan besar di Poso, yakni jalan Irian Jaya. Mereka

¹¹ "Bendera Turun Emosi Naik", dalam *TEMPO*, 10 Desember 2000, hlm. 30-31.

¹² "Tragedi Poso Duka Kita Bersama" dalam *TEMPO*, 18 Juni 2000, hlm. 20-22.

memukuli tiang listrik di sekitar perumahan orang-orang Islam. Ketika warga setempat bangun, mereka mengacung-acungkan parang dan golok seperti menantang. Seorang polisi yang kebetulan lewat mencoba meleraikan. Namun malang menimpanya karena ia dikeroyok sampai tewas dan pistolnya diambil. Melihat keadaan itu, warga menjadi marah dan melawan. Kelompok Kristen melarikan diri ke sebuah gereja milik Yayasan Santa Theresia. Polisi kemudian memblok wilayah itu dan menangkap semua yang ada di dalamnya. Melihat kawanannya pengacau dibawa begitu saja oleh Polisi maka massa melampiaskan kejengkelannya dengan merusakkan gereja. Kerusakan masih berlangsung terus hingga beberapa hari sesudahnya. Korban yang tewas diperkirakan 119 orang dan luka-luka berjumlah 146 orang.

2.5. Kerusakan Sampit – Kalimantan Tengah¹³

Kerusuhan Sampit berawal dari terbunuhnya sebuah keluarga Madura, yakni keluarga Matayo pada tanggal 18 Februari 2001. Keempat anggota keluarga itu dibantai oleh sekelompok orang yang tidak dikenal. Empat jam sesudah peristiwa itu, ratusan orang Madura berkumpul di depan rumah Timil (orang Dayak, tetangga keluarga Matayo). Orang-orang Madura menduga Timil menyembunyikan para pembunuh dan meminta supaya Timil menyerahkan para pembunuh itu. Para penghuni rumah yang berjumlah 39 orang tidak berani keluar. Oleh karena tidak ada yang keluar, maka massa Madura menjadi marah. Mereka mulai melempari rumah itu. Untunglah polisi segera datang. Semua penghuni rumah itu ditangkap dan dijadikan tersangka pembunuhan. Melihat buruannya dibawa polisi maka massa Madura

¹³ “Kesumat Tak Pernah Tamat” dalam *TEMPO*, 4 Maret 2001, hlm. 27-29.

melampiasikan kemarahannya dengan membakar rumah itu dengan segala isinya. Selesai membakar rumah Timil, massa itu juga membakar rumah Daur, saudara Timil. Malang bagi Daur. Ketika rumah itu terbakar, ia dan anak serta cucunya mati terpanggang karena tidak bisa melarikan diri.

Khabar buruk itupun menyebar dengan cepat. Aksi orang Madura itu mendapat balasan serupa dari Dayak. Penduduk asli dari luar kota mulai berdatangan. Mereka melakukan pembakaran dan pembunuhan. Bagai bola salju aksi itu menggelinding terus dan semakin lama semakin besar. Selama empat hari yakni dari Minggu tanggal 18 Februari sampai dengan Rabu 21 Februari 2001 polisi mencatat ada 65 orang yang tewas. Tetapi angka yang tidak resmi menyebutkan ada ratusan orang yang tewas. Ribuan orang Madura mengungsi keluar kota. Hingga saat ini, masalah Sampit belum teratasi secara tuntas, khususnya berhubungan dengan pengungsi dan rencana mengembalikan orang Madura ke Sampit.

2.6. Peledakan Bom Pada Malam Natal¹⁴

Kisah tragis komunitas kristiani kembali terjadi setelah adanya ledakan bom di beberapa gereja di tanah air pada perayaan malam natal tahun 2000. Ledakan terjadi di 26 lokasi di beberapa kota besar di Jawa. Di Jakarta sendiri terjadi ledakan di enam lokasi gereja pada waktu yang hampir bersamaan.

Ledakan pertama terjadi di Gereja Protestan Koinonia di Jatinegara pada jam 19.50. Bom itu diletakkan di samping Gereja Koinonia dan meledak ketika sebuah Mikrolet M-16 lewat.

¹⁴ "Tragedi Malam Natal" dalam *TABLOID ROHANI POPULER SABDA*, EDISI NO. I/TAHUN IV/Januari 2001, p. 3.

Ledakan itu menewaskan sopir dan berapa penumpang serta umat yang hendak dan usai merayakan Natal. Selang beberapa waktu kemudian yakni jam 20.45 ledakan bom kembali menghancurkan parkirannya depan Gereja Oikumene, Halim Perdana Kusuma. Ledakan itu berasal dari sebuah mobil. Guncangan bom itu tidak mendatangkan korban berhubung semua umat saat itu masih berada dalam gereja.

Kira-kira lima belas menit kemudian, yakni pukul 21.00 sebuah bom kembali meledak di depan Gereja Katedral. Kembali umat Kristen dan pedagang kaki lima yang kebanyakan beragama Islam yang sering kali berjualan di depan katedral itu menjadi korban. Dalam waktu yang bersamaan, tepatnya pukul 21.00, terjadi lagi sebuah ledakan di depan Gereja Santo Yosef Matraman, yang letaknya kurang lebih 400 meter dari Gereja Koinonia tempat peledakan bom yang pertama. Peledakan terjadi persis ketika umat baru menyelesaikan misa sehingga ada banyak orang yang menjadi korban. Dua orang mati di tempat sedangkan lain-lainnya mendapat luka berat.

Ketika umat Kristen masih bingung dengan rentetan ledakan-ledakan bom yang telah mengguncang beberapa Gereja terjadi lagi empat ledakan bom di depan Kolese Kanisius dan memporak-porandakan mobil-mobil yang diparkir di situ. Lima orang luka berat termasuk penyanyi kondang Melky Goeslaw. Kemudian sebuah ledakan lagi terjadi di Gereja Protestan di Bekasi Selatan pada jam 21.18. Satu orang meninggal dunia. Ledakan bom-bom itu tidak cuma terjadi di Jakarta melainkan juga di Bandung, Sukabumi, Bekasi, Mojokerto, Riau, Batam, dan Sumatera Utara. Jumlah korban yang meninggal adalah 18 orang dan yang luka berat adalah 69 orang.

2.7. Kesimpulan

Salah satu fenomena yang menonjol sejak berakhirnya masa pemerintahan Orde Baru ialah merebaknya konflik dan kerusuhan di mana-mana. Konflik dan kerusuhan itu bukan saja meningkat dalam intensitasnya tetapi juga dalam jumlahnya. Hampir setiap pulau besar di Republik ini pernah dilanda kerusuhan atau konflik. Di atas telah dipaparkan beberapa contoh kerusuhan besar yang pernah terjadi dalam satu-dua tahun terakhir ini. Persoalannya ialah apakah penyebab atau akar dari masalah-masalah atau konflik-konflik itu?

Pada bagian berikut ini akan diuraikan beberapa penjelasan yang berasal dari ilmu sosial, khususnya sosiologi mengenai penyebab dari masalah-masalah itu. Apa penjelasan sosiologi mengenai konflik atau kerusuhan di Indonesia yang sering kali terjadi akhir-akhir ini?

3. Analisis Sosiologis tentang Konflik di Indonesia

Konflik dan kerusuhan adalah tema yang sangat populer dan hampir setiap orang berbicara atau membuat analisis tentang konflik-konflik yang sedang terjadi di Indonesia. Saya ingin mendasari analisis saya dengan dasar-dasar teoritis agar ia punya landasan yang kuat. Karena itu dalam bagian ini, uraian saya mungkin agak bersifat teoritis dengan harapan bahwa sesudahnya kita bisa memahami latar belakang analisis yang diberikan. Saya ingin memulai analisis teoritis itu dengan menguraikan secara singkat tentang apa itu sosiologi. Barulah sesudah itu akan diuraikan pandangan sosiologis tentang konflik-konflik yang sedang terjadi di Indonesia khususnya yang berasal dari teori fungsionalisme struktural dan teori konflik.

3.1. Apa Itu Sosiologi

Sosiologi adalah ilmu yang relatif baru. Karena itu tidaklah mengherankan kalau tidak banyak orang yang mengenal ilmu itu. Secara harfiah sosiologi berarti ilmu atau studi tentang masyarakat. Studi tentang masyarakat itu bisa ditelusuri sejak abad 14 ketika Ibn Khaldun membuat studi tentang timbul-tenggelamnya kebudayaan Arab. Tetapi orang yang pertama menggunakan kata *sosiologi* adalah Auguste Comte (1798-1853) dalam bukunya *The Positive Philosophy*. Pendekatan sosiologis dari Comte didasarkan pada satu asumsi bahwa positivisme bisa memberikan dasar-dasar ilmiah (empiris) terhadap studi tentang masyarakat. Dia yakin bahwa sosiologi bisa menemukan hukum-hukum yang bersifat umum tentang perubahan-perubahan sosial sebagaimana halnya hukum-hukum dalam ilmu lain. Tetapi tentu saja cita-cita Comte terlalu ambisius karena pada akhirnya sosiologi tidak memiliki hukum-hukum atau teori-teori yang sedemikian pasti seperti di dalam ilmu alam atau ilmu-ilmu lainnya.¹⁵

Pada akhir abad 19 dan awal abad 20, di bawah pengaruh Emile Durkheim (1858-1912) dan Max Weber (1864-1920) sosiologi menjadi lebih diterima sebagai satu ilmu yang berdiri sendiri. Bagi Durkheim sosiologi adalah *ilmu yang mempelajari fakta sosial yang sifatnya eksternal dan berada di luar individu*. Tujuan sosiologi menurutnya ialah menjelaskan segala fakta sosial (hukum, norma, kebiasaan, adat istiadat, agama, dan lain-lain) yang berada di dalam masyarakat dan mengontrol masyarakat itu. Sedangkan bagi Weber, sosiologi adalah *ilmu yang berhubungan dengan pemahaman interpretatif mengenai*

¹⁵ Nicholas Abercrombie et al., *Dictionary of Sociology* (New York: Penguin Books, 1988:232-233).

tindakan sosial. Tujuan sosiologi menurut Weber ialah mau memahami (*verstehen*) atau memberikan penjelasan mengapa seseorang bertindak demikian. Jelaslah bahwa sosiologi Durkheim bersifat makro, yakni mempelajari fakta sosial yang bersifat makro sedangkan sosiologi Weber bersifat mikro yakni memahami arti yang diberikan oleh individu terhadap tingkah lakunya.¹⁶

Pandangan kedua sosiolog awal ini sangat mempengaruhi diskusi sosiologis sesudahnya. Salah seorang sosiolog yang cukup dikenal dewasa ini adalah George Ritzer dari Amerika Serikat. Menurut dia, sosiologi adalah *A Multiple Paradigm Science* atau ilmu pengetahuan berparadigma ganda. Paradigma adalah “pandangan yang mendasar dari ilmuwan tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang semestinya dipelajari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan”.¹⁷ Dengan kata lain, paradigma adalah pokok persoalan dari satu cabang ilmu pengetahuan. Kalau sosiologi disebut *a multiple paradigm science* atau ilmu berparadigma ganda maka hal itu berarti bahwa di dalam sosiologi terdapat lebih dari satu paradigma.

Ide tentang sosiologi sebagai *multiple paradigm science* sudah mulai mengemuka ketika Robert Friedrich di dalam bukunya *Sociology of Sociology* mengangkat dua paradigma utama di dalam sosiologi, yakni *paradigma sistem* yang menekankan aspek konsensus dan integrasi di dalam masyarakat dan *paradigma konflik* yang menekankan aspek konflik dan pergolakan.¹⁸ Kemudian berdasarkan pemahaman dirinya sebagai ilmuwan sosial, dia membedakan dua paradigma yakni *para-*

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ George Ritzer (Peny. Alimandan), *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda* (Jakarta: Rajawali Press, 1992) p. 8.

¹⁸ *Ibid.*

digma kenabian dan *paradigma keimaman*. Pendukung paradigma kenabian memahami dirinya sebagai agen-agen perubahan sosial sedangkan pendukung-pendukung paradigma keimaman memahami dirinya sebagai orang-orang yang mempertahankan stabilitas masyarakat.¹⁹

Ritzer sendiri berpendapat bahwa di dalam sosiologi ada tiga paradigma utama, yang disebutnya sebagai paradigma fakta sosial, paradigma definisi sosial, dan paradigma perilaku sosial.

- Paradigma fakta sosial melihat bahwa pokok persoalan yang utama di dalam sosiologi adalah fakta sosial (*social facts*). Fakta sosial adalah barang sesuatu (*a thing*) yang berbeda dari ide-ide. Fakta sosial adalah suatu kenyataan objektif yang berada di luar individu. Pendukung utama dari paradigma ini adalah Emile Durkheim. Teori-teori yang bernaung di bawahnya adalah teori fungsionalisme struktural dan teori konflik.
- Paradigma definisi sosial menganggap pokok persoalan utama di dalam sosiologi adalah tindakan sosial, yakni tindakan seorang individu sepanjang tindakan itu mempunyai makna atau arti subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada orang lain. Weber, pendukung utama paradigma ini, mengartikan sosiologi sebagai ilmu yang berusaha menafsirkan dan memahami (*interpretative understanding*) tindakan sosial. Di dalam definisi itu ada dua unsur penting, yakni tindakan sosial dan interpretasi. Teori-teori yang bernaung di bawah paradigma ini adalah teori aksi, inter-aksionisme simbolik, fenomenologi, ethnometodologi, dan dramaturgi.

¹⁹ Margareth M. Poloma (Penerj. Yasogoma), *Sosiologi Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000) p. 14.

- Paradigma perilaku sosial melihat bahwa pokok persoalan di dalam sosiologi adalah tingkah laku individu dalam hubungan dengan lingkungan dan perubahan tingkah laku yang diakibatkan oleh hubungan dengan lingkungan itu. Perbedaannya dengan paradigma definisi sosial ialah bahwa aktor dalam paradigma definisi sosial bersifat dinamis dan kreatif karena melibatkan interpretasi. Sedangkan dalam paradigma perilaku sosial, aktor kurang sekali memiliki kebebasan. Tanggapan yang diberikannya lebih ditentukan oleh stimulus yang datang dari luar dirinya. Jadi, tingkah laku manusia lebih bersifat mekanik karena ditentukan oleh sesuatu yang berada di luar dirinya (norma, nilai, struktur sosial, dll). Teori-teori yang bernaung di bawah paradigma ini adalah sosiologi perilaku dan teori pertukaran sosial.

Dari uraian tersebut di atas kita bisa melihat bahwa di dalam sosiologi ada berbagai teori. Teori adalah semacam penjelasan atau interpretasi tentang sesuatu hal. Kata 'teori' itu sendiri memberikan nuansa yang sangat ilmiah. Tetapi sebetulnya, sadar atau tidak sadar, semua orang berteori. Ibu-ibu di dapurpun bisa berteori tentang hasil masakannya yang enak. Demikian pun petani di sawah bisa berteori tentang panennya yang gagal. Berteori dengan memberikan interpretasi adalah sangat penting karena dengan itu manusia bisa keluar dari ketidak-tahuan atau kegelapan.

Sosiologi sebagai satu disiplin ilmiah juga memiliki teori-teori yang coba memberikan interpretasi atas kenyataan-kenyataan sosial yang ada di dalam masyarakat. Namun patut diperhatikan bahwa di dalam sosiologi tidak ada satu teori tunggal yang bisa menjelaskan seluruh kenyataan sosial. Dengan kata lain sebuah kenyataan sosial tidak akan dipahami secara utuh kalau dianalisis dengan menggunakan satu teori saja. Dalam hal ini, teori bisa

dianggap sebagai satu perspektif atau cara pandang dalam menganalisis kenyataan sosial.

Di dalam menganalisis konflik-konflik yang terjadi di Indonesia, saya menggunakan dua teori yang cukup dominan di dalam sosiologi, yakni teori fungsionalisme struktural dan teori konflik. Kedua teori ini bernaung di bawah paradigma fakta sosial yang melihat pokok persoalan di dalam sosiologi adalah fakta sosial dan karena itu mereka bisa menganalisis fakta-fakta sosial seperti konflik dan kerusuhan yang terjadi akhir-akhir ini di Indonesia. Dengan kata lain fokus dari analisis teori fungsionalisme struktural dan teori konflik fakta sosial. Contoh-contoh dari fakta sosial itu adalah konflik dan kerusuhan. Karena itu konflik dan kerusuhan itu harus dianalisis dengan menggunakan teori yang bernaung di bawah paradigma fakta sosial.

3.2. Analisa Berdasarkan Pandangan Fungsionalisme Struktural

3.2.1. Apa itu Fungsionalisme Struktural

Fungsionalisme adalah salah satu perspektif di dalam sosiologi yang memandang masyarakat sebagai satu sistem yang terdiri dari elemen-elemen atau bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain di mana bagian yang satu tak dapat berfungsi tanpa ada hubungan dengan bagian yang lain dan perubahan pada salah satu bagian akan menyebabkan ketidakseimbangan sehingga guna mempertahankan keseimbangan yang sudah pernah ada maka diciptakan perubahan pada bagian-bagian lain.²⁰ Pandangan ini sangat dipengaruhi oleh biologi di

²⁰ George A. Theodorson, *A Modern Dictionary of Sociology* (New York: Thomas Y. Crowell Co., 1969) p. 167.

mana para sosiolog menyamakan masyarakat dengan organisme. Misalnya, organ tubuh manusia bisa berfungsi dengan baik kalau semua anggota tubuh menjalankan fungsinya dengan baik.

Lahirnya fungsionalisme struktural di dalam sosiologi sangat dipengaruhi oleh karya-karya klasik Emile Durkheim. Sebagaimana halnya Herbert Spencer yang melihat masyarakat sebagai organisme hidup,²¹ demikian juga Durkheim melihat masyarakat modern sebagai keseluruhan organisme yang memiliki realitas tersendiri. Keseluruhan tersebut memiliki seperangkat kebutuhan dan fungsi yang harus dipenuhi oleh bagian-bagian yang menjadi anggota dari keseluruhan realitas itu agar keseluruhan itu bisa tetap berada dalam keadaan normal, stabil, seimbang, atau berfungsi secara baik.²²

Berdasarkan pandangan ini kita bisa mengatakan bahwa masyarakat Indonesia terbentuk dari berbagai elemen seperti ras, suku, agama, golongan, ekonomi, politik, hukum, adat istiadat, pemerintahan, dan lain-lain. Setiap elemen di dalam keseluruhan yang disebut masyarakat itu harus menyumbangkan sesuatu atau menjalankan fungsi masing-masing dengan baik supaya masya-

²¹ Herbert Spencer, *Synthetic Philosophy* (New York: D. Appleton and company 1895) p. 436-506 yang dikutip oleh M. Poloma, *Op. cit.* pp. 14-15. Dalam pembahasannya Spencer menyebutkan lima persamaan antara masyarakat dan organisme. Pertama, keduanya sama-sama hidup dan mengalami pertumbuhan. Kedua, oleh karena keduanya bertumbuh dan berkembang maka bagian-bagiannya menjadi semakin banyak dan kompleks. Ketiga, setiap bagian di dalam masyarakat dan organisme mengemban fungsi tertentu. Keempat, perubahan pada satu bagian akan menyebabkan perubahan pada bagian lain dan pada akhirnya menyebabkan perubahan pada sistem secara keseluruhan. Kelima, bagian-bagian yang terkait itu merupakan suatu struktur mikro yang bisa dipelajari secara terpisah.

²² M. Poloma, *Op. cit.* p. 25.

rahat secara keseluruhan bisa bertahan atau berfungsi secara normal. Kemacetan pada salah satu elemen akan mengganggu stabilitas secara keseluruhan. Misalnya kemacetan elemen ekonomi akan mengganggu sistem secara keseluruhan sebagaimana halnya yang terjadi di Indonesia sejak terjadinya krisis ekonomi tahun 1997.

Secara ekstrim, pendukung teori ini berpendapat bahwa segala sesuatu di dalam masyarakat pasti ada manfaatnya atau ada fungsinya, termasuk kemiskinan, peperangan, atau ketidakadilan sosial. Tetapi di sini muncul soal, yakni fungsional untuk siapa? Sebab kemiskinan bagi orang miskin, misalnya, fungsional untuk orang-orang kaya tetapi sama sekali bersifat disfungsional untuk orang-orang miskin. Demikianpun halnya dengan peperangan. Ia bisa fungsional untuk orang-orang atau negara-negara yang menjual senjata tetapi tidak fungsional atau disfungsional untuk orang-orang yang menjadi korban peperangan.

Pendapat seperti yang disebutkan terakhir itu, misalnya, dikemukakan oleh Herbert Gans yang membuat analisis tentang kemiskinan di Amerika Serikat. Menurut dia, bagaimanapun, kemiskinan mempunyai beberapa fungsi positif untuk kehidupan ekonomi, kehidupan sosial, kehidupan politik, dan kehidupan budaya.²³ Pandangan teoritis tentang masyarakat yang demikian sering kali menyebabkan fungsionalisme struktural dituduh sebagai

²³ Herbert Gans, "The Positive Functions of Poverty" dalam *American Journal of Sociology* 78 (1972) pp. 275-289. Di dalam artikel itu ia menguraikan fungsi kemiskinan seperti: menyediakan tenaga kerja untuk pekerjaan kotor di dalam masyarakat, menimbulkan dana-dana sosial, membuka lapangan kerja baru karena dikehendaki oleh orang miskin, pemanfaatan barang bekas karena tidak digunakan oleh orang kaya, menguatkan norma-norma sosial di dalam masyarakat, menimbulkan altruisme terhadap orang-orang miskin yang sangat membutuhkan

aliran yang mempertahankan status quo. Bahkan ada yang menilai aliran ini sebagai agen teoritis dari status quo. Mungkin saja kritik yang dilancarkan terhadap fungsionalisme struktural ini benar andaikata pendukung-pendukung teori itu tidak mengembangkan teorinya lebih lanjut untuk menjawab masalah-masalah yang berhubungan dengan perubahan sosial dan konflik.

Robert K. Merton, salah seorang pendukung dari teori itu, melengkapi fungsionalisme struktural dengan konsep-konsep baru seperti *disfungsi* dan *fungsi laten*.²⁴ Menurut Merton, tidak semua kenyataan sosial itu bersifat fungsional. Ada kenyataan sosial yang fungsional untuk kelompok tertentu tetapi disfungsional (tidak berfungsi) untuk kelompok lainnya. Sistem perbudakan di Amerika Serikat, misalnya, bersifat fungsional untuk orang-orang kulit putih tetapi bersifat disfungsional bagi orang-orang kulit hitam. Selain itu, dia juga mengatakan bahwa tidak semua fungsi itu berjalan seperti yang direncanakan sebab ada juga fungsi-fungsi atau konsekuensi-konsekuensi yang tidak diperhitungkan. Merton menyebut fungsi-fungsi seperti itu fungsi-fungsi *laten*. Misalnya, birokrasi yang pada awal mulanya diciptakan untuk memperlancar

bantuan sosial, orang kaya dapat merasakan susahnya menjadi orang miskin tanpa harus menjadi miskin, orang miskin menyediakan ukuran kemajuan bagi kelas lain, membantu kelompok lain yang sedang berusaha sebagai anak tangganya, menyediakan alasan untuk munculnya orang kaya yang membantu orang miskin dengan berbagai badan amal, menyediakan tenaga fisik untuk membangun monumen-monumen kebudayaan, kultur orang miskin sering kali diterima oleh strata sosial yang berada di atas mereka, orang miskin berjasa menjadi kelompok yang menyebabkan kegelisahan bagi kelompok lain, isu mengenai perubahan dan pertumbuhan di masyarakat selalu diletakkan di atas masalah bagaimana membantu orang miskin, dan kemiskinan menyebabkan sistem politik di Amerika Serikat lebih stabil.

²⁴Robert K. Merton, *Social Theory and Social Structure* (New York: The Free Press, 1968) pp. 115-136.

segala urusan terkadang menjadi penghambat.

Berdasarkan pandangan sosiologis yang demikian, kita barangkali bisa menjelaskan latar belakang, sebab-sebab, atau akar dari konflik dan kerusuhan di Indonesia yang terjadi akhir-akhir ini. Menurut hemat saya, sebab-sebab konflik di Indonesia dapat dianalisis dengan menggunakan kerangka pikiran *disfungsi* dan *fungsi laten* dari Robert K. Merton.

3.2. Analisis Fungsionalisme Struktural Tentang Konflik Di Indonesia

Dalam kerangka pemikiran fungsionalisme struktural, masyarakat Indonesia bisa mencapai tujuannya sebagai masyarakat yang adil dan makmur secara rohani dan jasmani kalau setiap elemen atau institusi pembentuk masyarakat menjalankan fungsinya dengan baik atau bersifat fungsional. Hal itu berarti bahwa masyarakat Indonesia akan mencapai masyarakat yang adil dan makmur kalau institusi pendidikan, agama, politik, ekonomi, pemerintahan, dan lain-lain menjalankan fungsinya dengan baik. Konflik terjadi karena salah satu atau beberapa dari elemen-elemen atau institusi-institusi itu tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Tetapi tentu saja jenis dan intensitas ketidakberfungsian (*disfungsi*) elemen-elemen itu berbeda dari satu kasus ke kasus lainnya. Pada bagian berikut ini akan diuraikan beberapa *disfungsi* yang paling menonjol dari setiap kasus konflik di Indonesia.

3.2.1. *Disfungsi Institusi Politik Di Aceh dan Papua*

Dalam masalah Aceh penyebab utama konflik adalah *disfungsi* atau ketidakberfungsian institusi politik sedangkan ketidakberfungsian elemen-elemen lainnya merupakan akibat dari

disfungsi dalam bidang politik. Disfungsi atau ketidakberfungsian di sini dimaksudkan sebagai ketidakmampuan suatu institusi atau elemen untuk menjalankan fungsinya secara baik atau bijaksana. Dari deskripsi mengenai konflik yang terjadi di Aceh kita bisa melihat bahwa masalah Aceh disebabkan oleh kebijaksanaan politik atau pemerintahan yang terlalu bersifat sentralistis. Pemerintahan pusat terlalu kuat dalam menentukan banyak hal sedangkan daerah kurang diberi wewenang untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Salah satu akibat dari kebijaksanaan itu untuk Aceh ialah banyak kekayaan daerah yang mengalir ke pusat (Jakarta) sedangkan daerah tetap merana. Itulah sebabnya Aceh yang menurut statistik menyumbang 30% dari ekspor dan gas Indonesia tetap menjadi provinsi ketujuh termiskin.

Selain disfungsi politik di Aceh juga terjadi disfungsi ekonomi, khususnya, kebijaksanaan ekonomi pemerintah pusat yang menekankan pertumbuhan dari pada pemerataan. Bertahun-tahun, sebelum kejatuhannya, Indonesia selalu bangga karena pertumbuhan ekonominya rata-rata 7% setiap tahun, suatu angka yang menakjubkan dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di negara-negara yang maju. Tetapi anehnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu tidak disertai dengan kemakmuran yang merata untuk rakyat banyak. Soalnya distribusi kekayaan atau hasil pembangunan itu tidak merata. Apa lagi ketika krisis mulai terjadi barulah diketahui bahwa ternyata ekonomi Indonesia dibangun di atas dasar yang bobrok, yakni pinjaman luar negeri yang pemanfaatannya bukanlah untuk kepentingan rakyat. Akibatnya, sebagian besar hasil pembangunan hanya dinikmati oleh sekelompok orang saja. Aceh boleh memiliki sumber alam yang kaya tetapi kekayaan itu hanya dinikmati oleh sekelompok orang yang mungkin kebanyakan berasal dari luar daerah sedangkan kebanyakan rakyat Aceh tetap merana dalam kemiskinan.

Hal yang kurang lebih sama terjadi di Papua. Keinginan Papua untuk melepaskan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia tidak terlepas dari reaksi ketidakpuasan atas kebijaksanaan pemerintah pusat yang sentralistis itu. Dengan tambang emas yang luar biasa di Freeport dan kekayaan hasil hutannya, Irian Jaya atau Papua adalah salah satu provinsi yang menyumbang paling banyak untuk pemerintah pusat. Tetapi sumbangannya yang begitu besar untuk pemerintah pusat tidak diimbangi dengan kemakmuran yang dialami oleh rakyat Papua. Sekalipun pada saya tidak ada statistik, tetapi saya kira Irian Jaya atau Papua tetap merupakan provinsi yang terkebelakang di Indonesia.

Keadaan Papua menjadi tambah parah lagi karena kekayaan pulaunya dibawa ke Jakarta (pulau Jawa) dan pada waktu yang sama, pulau mereka dibanjiri oleh berbagai transmigran dari luar pulau, khususnya pulau Jawa, akibat kebijaksanaan politik pemerintah yang mencanangkan program transmigrasi. Ada dua hal yang bisa dikatakan tentang program transmigrasi ini. Pertama, program transmigrasi itu sendiri bersifat fungsional untuk para transmigran karena hidup mereka menjadi lebih baik dari pada ketika mereka hidup di daerah asalnya tetapi bersifat disfungsional untuk orang-orang Papua karena para pendatang itu merebut aset-aset kekayaan mereka. Kedua, fungsi laten dari program transmigrasi itu atau fungsi yang tidak diperhitungkan oleh pemerintah ialah program itu sendiri menyebabkan ketidakpuasan pada orang-orang setempat karena alasan yang disebutkan di atas tadi.

Kita masih bisa menambahkan uraian kita tentang ketidakberfungsian institusi-institusi lainnya. Tetapi menurut hemat saya ketidakberfungsian kedua hal tersebut di atas menyebabkan terjadinya konflik di Aceh dan Papua. Mungkin bisa ditambahkan satu hal saja yakni ketidakberfungsian institusi pendidikan.

Bagaimana pun, institusi-institusi itu dijalankan oleh manusia-manusia. Pendidikan kita kelihatannya berorientasi pada keberhasilan materi dan mengabaikan integritas moral. Oleh karena itu, orang merasa tidak bersalah jika demi memperoleh kesejahteraan materi itu, dia boleh melakukan apa saja termasuk hal-hal yang berlawanan dengan norma-norma umum masyarakat atau hukum-hukum positif suatu negara.

3.2.2. *Disfungsi Agama Di Maluku dan Poso*

Dari uraian mengenai potret konflik di atas kita sudah melihat bahwa konflik yang terjadi di tempat-tempat itu adalah konflik yang bernuansa agama. Kerusuhan terjadi antara kelompok Kristen di satu pihak dan kelompok Islam di pihak lain. Konflik yang berbau agama ini sedikit mengherankan karena salah satu fungsi agama menurut Emile Durkheim adalah untuk menjaga keutuhan masyarakat atau menjaga integritas sosial.²⁵ Tetapi dalam kenyataannya, masyarakat menjadi terpecah-pecah dan tercabik-cabik karena memeluk agama yang berbeda-beda. Dalam hal ini agama menjadi tidak berfungsi atau disfungsi karena dia yang seharusnya mengajarkan nilai-nilai, norma-norma, hukum-hukum cinta kasih belum mampu merubah tingkah laku para penganutnya. Dengan kata lain agama belum bisa menjadi *dominant culture*²⁶ untuk para penganutnya. Ajaran agama tidak selalu dipertimbangkan ketika orang melakukan sesuatu.

²⁵ Emile Durkheim, *The Elementary Forms of the Religious Life* (London: Allen and Unwin, 1912) p. 387.

²⁶ Ignas Kleden, "Agama dan Antinomi" dalam *TEMPO*, 7 Januari 2001, p. 70.

Disfungsi atau ketidakberfungsian agama itu bisa juga dilihat sebabnya pada salah satu antinomi agama, yaitu semacam paradoks antara dua fungsi agama yang tidak selalu sejalan.²⁷ Salah satu antinomi yang berhubungan dengan kehidupan agama adalah watak keselamatan dari agama-agama. Tidak semua agama besar di dunia mempunyai sifat misioner, seperti agama Buddha atau Hindu. Dua agama yang mempunyai karakteristik misioner yang paling kuat adalah agama Islam dan Kristen. Namun demikian setiap agama jelas menginginkan bahwa apa yang diyakininya sebagai keselamatan dapat dinikmati oleh orang lain dan kalau bisa dinikmati oleh sebanyak mungkin orang. Dengan demikian agama-agama tidak pernah menjadi eksklusif dalam arti berusaha membatasi jumlah penganutnya melainkan cenderung menjadi inklusif yaitu membawa sebanyak mungkin orang ke dalam lingkungannya untuk menikmati keselamatan yang dijanjikan oleh agamanya.²⁸ Kepercayaan agama yang demikian, yakni menganggap agama sendiri lebih baik dari agama lain tentu saja mempengaruhi tingkah laku manusia. Hal itu bisa saja terjadi karena agama adalah struktur sosial dan menurut Merton, sebagaimana diuraikan oleh Margareth Poloma, struktur dapat sangat mempengaruhi perilaku manusia.²⁹

Pengaruh struktur terhadap perilaku manusia dijelaskan oleh Merton dengan konsep *self fulfilling prophecy*, yakni ramalan yang terpenuhi karena kekuatannya sendiri. Konsep ini merupakan penyempurnaan dari konsep klasik dari W. I. Thomas yang mengatakan: "*if men define situation as real they are real in their consequences*", yakni apabila orang menganggap situasi

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Margareth M. Poloma, *Op.Cit.* p. 32-34.

tertentu sebagai sesuatu yang riil, maka hal itu akan menjadi sungguh-sungguh riil dalam kenyataannya. Merton menyatakan bahwa pada mulanya *the selffulfilling prophecy* adalah anggapan yang keliru mengenai definisi situasi tetapi kemudian menimbulkan perilaku baru dengan akibat bahwa anggapan pada awalnya keliru itu menjadi kenyataan.

Jadi, dalam hal ini, definisi seseorang mengenai suatu situasi menjadi sangat penting. Dan definisi seseorang mengenai situasi sangat dipengaruhi oleh struktur sosial. Misalnya, agama saya mendefinisikan agama lain sebagai kurang baik. Hal ini sebetulnya merupakan anggapan yang keliru. Tetapi anggapan yang keliru ini mempengaruhi tingkah laku saya dalam berhubungan dengan agama lain tersebut. Akibatnya apa yang pada mulanya dianggap keliru itu telah menjadi kenyataan karena saya sungguh memperlakukan agama lain sebagai sesuatu yang tidak baik. Itulah yang dimaksudkan oleh Merton dengan konsep *selffulfilling prophecy* yang merupakan penyempurnaan pernyataan klasik W. I. Thomas “*if men define situation as real, they will be real in their consequences*”.

Pertikaian antara agama itu menjadi bertambah buruk karena sering kali orang memanfaatkan agama yang berwajah ganda itu untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Di dalam kasus Poso, misalnya, ternyata “akar persoalan Poso adalah perebutan kekuasaan elit politik lokal untuk memegang tampuk pimpinan daerah”.³⁰ Dengan demikian, agama dipakai sebagai alat kepentingan politik. Guna menghimpun kekuatan dan mencapai keinginan mereka menggunakan agama sebagai sarana. Mungkin

³⁰ “Tragedi Poso, Duka Kita Bersama” dalam *TEMPO*, 18 Juni 2000 p.22.

hal yang sama bisa dikatakan tentang kerusuhan di Maluku. Dari cerita para saksi mata kerusuhan di Maluku ada sinyalemen bahwa bentrokan yang bernuansa agama di sini pun tidak terlepas dari pemanfaatan agama oleh kelompok-kelompok tertentu.

3.2.3. *Disfungsi Politik Di Sampit*

Kerusuhan atau konflik yang terjadi antara etnis Dayak dan Madura di Sampit merupakan akibat dari kebijaksanaan politik yang tidak tepat khususnya dengan program transmigrasi khususnya perpindahan warga Madura ke wilayah itu. Perpindahan penduduk Madura ke Sampit mencapai jumlah yang sangat menyolok pada saat dimulainya Proyek Jalan Kalimantan, yakni jalan raya yang menghubungkan Sampit dengan Palangka Raya (220 km) pada tahun 1957. Orang-orang Madura pendatang itu pada umumnya bekerja sebagai buruh kasar untuk membangun jalan dan membuka hutan. Pada masa Orde Baru jumlah itu bertambah membengkak dengan gelombang pendatang baru, khususnya orang Jawa dan Madura, melalui program transmigrasi. Sebelum kerusuhan terjadi, kebanyakan penduduk kota Sampit adalah warga Madura yakni 60% dibandingkan dengan etnis Dayak yang hanya 20% dan suku-suku lainnya 20%. Lebih dari itu kebanyakan jabatan di dalam pemerintahan diduduki oleh orang Jawa Madura sehingga akhirnya masyarakat Dayak terpinggirkan di berbagai sektor.³¹

“Dalam keadaan yang demikian”, kata Prof. H.K.M.A. Usop, mantan Rektor Universitas Palangka Raya dan tokoh masyarakat Dayak, “kadang-kadang terjadi kekerasan yang dilakukan oleh saudara-saudara kita orang Madura”.³² Pada

³¹ “Mencari Akar, Mencari Jawaban” dalam *TEMPO*, 11 Maret 2001, p.

akhirnya orang Dayak menjadi orang asing dan tidak aman di negerinya sendiri. Oleh karena merasa tidak aman maka sebagai kelompok mereka merasa semakin senasib sebagai orang-orang yang tertindas. Perasaan itu semakin membuat merasa bersatu karena mempunyai musuh bersama. Itulah sebabnya beberapa dasawarsa terakhir ini sering kali terjadi kerusuhan atau konflik berdarah antara suku Dayak dan suku-suku pendatang.

Pada tahun 1967 terjadi konflik berdarah antara Dayak dan Cina dengan korban 300 orang tewas dan 55 ribu etnis Cina diungsikan. Kemudian kerusuhan berikutnya terjadi pada tahun 1983 di kota Bukit Batu, Waringin Timur yang diakhiri dengan kesepakatan antara tokoh Dayak dan Madura: “apabila warga Madura menimbulkan pertumpahan darah terhadap orang Dayak, maka secara sukarela dan lapang dada dan tanpa dipaksa warga Madura bersedia meninggalkan Kalimantan Tengah. Lalu pada Desember 1996 dan Maret 1997 terjadi kerusuhan di Sanggau-ledo yang diawali dengan ditasuknya dua orang Dayak oleh warga Madura. Korban yang tewas 500 orang dan warga Madura yang diungsikan berjumlah 2000 orang.³³

Dari uraian tersebut di atas kita bisa melihat bahwa akar dari persoalan Sampit ialah kegagalan negara dalam menerapkan politik yang tepat. Perpindahan orang-orang Madura secara besar-besaran ke Kalimantan tanpa memperhitungkan pendapat orang-orang Dayak telah membawa malapetaka besar. Keadaan menjadi lebih parah lagi karena sering kali hukum gagal menjalankan fungsinya sebagai penegak keadilan. Menurut beberapa orang Dayak di Sampit, termasuk para pemuka adatnya, orang-orang Madura suka melakukan pencurian, penyerobotan tanah, dan

³³ *Ibid.*

tindakan kriminal lainnya tetapi tidak diapa-apakan. Dalam hal ini, institusi hukum menjadi tidak berfungsi.

3.2.4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, ternyata menurut analisis fungsionalisme struktural hampir semua konflik yang terjadi disebabkan oleh ketidakberfungsian sejumlah institusi sosial, teristimewa institusi politik dalam arti negara gagal menerapkan sebuah politik yang menunjang integritas Indonesia sebagai suatu bangsa. Samuel P. Huntington dalam bukunya *The Class of Civilizations and the Remaking of the World Order* sebagaimana dikutip oleh TEMPO³⁴ mengatakan bahwa kegagalan negara bisa mengarahkan dunia ke situasi anarki. Fenomena seperti pecahnya otoritas pemerintah, pecahnya otoritas negara, semakin intensifnya konflik etnis dan agama, pengungsi yang jumlah puluhan juta dan pembasmian etnis tertentu merupakan gejala-gejala yang mengancam integritas sebuah bangsa. Apa yang diramalkan oleh Huntington itu sudah terjadi di Yugoslavia yang terpecah setelah Tito meninggal dunia tahun 1980. Mudah-mudahan Indonesia tidak mengalami nasib yang sama.

Mungkin kesalahan yang paling besar dibuat oleh pemerintah Indonesia sejak awal ialah menerima kesatuan itu sebagai sesuatu yang *taken for granted*, sebagai sesuatu yang sudah jadi. Pada hal kesatuan itu mestinya dibangun secara bersama dan dalam penerapan politik selanjutnya aspek ini harus sangat diperhitungkan. Kebijaksanaan politis yang terlalu sentralistis di mana pemerintah pusat terlalu dominan sedangkan daerah menjadi tidak berdaya boleh dianggap sebagai akar kerusuhan di beberapa

³⁴ *Ibid.*

tempat seperti Aceh, Papua, Sampit di samping alasan karena hakikat agama yang berwajah ganda seperti yang terjadi di Maluku atau Poso. Itu kira-kira beberapa hal yang bisa dikatakan mengenai analisis teori fungsionalisme struktural tentang konflik-konflik di Indonesia. Guna mendalami analisis fungsionalisme struktural maka pada bagian berikut ini akan diuraikan pandangan teori konflik sendiri mengenai konflik yang berbeda-beda di Indonesia.

3.3. Analisis Berdasarkan Pandangan Teori Konflik

Teori konflik muncul sebagai reaksi atas teori fungsionalisme struktural yang menurut pendukung-pendukungnya tidak cukup mendalami persoalan-persoalan konflik di dalam masyarakat. Menurut David Lockedwood³⁵ *equilibrium* seperti yang dikemukakan oleh fungsionalisme struktural adalah konsep yang keliru tentang kenyataan sosial. Menurut dia, dengan asumsi-asumsi seperti keseimbangan dan keteraturan sosial, maka kenyataan sosial seperti ketidak-stabilan dan konflik dianggap sebagai suatu penyimpangan pada hal dalam kenyataannya ada hal-hal tertentu di dalam masyarakat yang mau tidak mau menciptakan konflik.

Sebagai reaksi atas fungsionalisme struktural tidaklah terlalu mengherankan kalau kedua teori ini mempunyai asumsi yang sama tentang masyarakat. Keduanya sama-sama melihat masyarakat sebagai terdiri dari elemen-elemen atau komponen-komponen tertentu. Tetapi perbedaannya terletak dalam hal berikut ini.

³⁵ David Lockedwood, "Some Remarks on the Social System" in *British Journal of Sociology* 7 (June 1956) 134-246. Dikutip oleh Jonathan Turner, *The Structure of Sociological Theory* (Homewood Illinois: The Dorsey Press, 1978) p.121.

Menurut fungsionalisme struktural setiap elemen pembentuk masyarakat itu menyumbangkan sesuatu kepada masyarakat sebagai keseluruhan sehingga masyarakat bisa berfungsi secara baik atau bisa mempertahankan equilibrium. Sedangkan menurut teori konflik, elemen-elemen pembentuk masyarakat itu mempunyai kepentingan yang berbeda-beda sehingga mau tidak mau mereka harus terlibat di dalam konflik.

Sekalipun teori ini muncul sebagai reaksi atas fungsionalisme struktural, namun sebetulnya teori ini sudah mempunyai akar di dalam karya Marx. Karl Marx mengembangkan beberapa asumsi tentang masyarakat yang di kemudian hari menjadi batu pijakan teori konflik, seperti:³⁶

- Masyarakat tersusun dari jaringan relasi yang bersifat sistematis, namun relasi-relasi itu diwarnai oleh kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan.
- Kenyataan ini menunjukkan bahwa sistem sosial di dalam dirinya menimbulkan konflik.
- Karena itu konflik merupakan sesuatu yang tak terelakkan dan merupakan satu ciri dari sistem sosial.
- Konflik yang demikian cenderung tampak dalam kepentingan yang berbeda-beda.
- Konflik sering kali terjadi karena pembagian sumber-sumber daya dan kekuasaan yang tidak merata.
- Konflik telah memungkinkan terjadinya perubahan di dalam masyarakat.

³⁶ Jonathan Turner, *The Structure of Sociological Theory* (Homewood Illinois: The Dorsey Press, 1978) p.127.

Selain dipengaruhi oleh Marx, teori konflik juga dipengaruhi oleh tokoh-tokoh teori elit seperti Vilfredo Pareto, Gaetano Mosca, dan Robert Michels yang berpendapat bahwa dalam setiap organisasi hanya sekelompok kecil orang saja yang berkuasa yang mereka sebut kelompok elit. Kelompok ini selalu berusaha bersama-sama untuk mempertahankan posisinya dan menggunakan posisi itu untuk kepentingan pribadi. Dengan kata lain, teori elit mengemukakan secara eksplisit argumen yang mengatakan bahwa alasan yang paling dasarnya untuk suatu konflik adalah perbedaan kepentingan dan kekuasaan.³⁷

Dewasa ini pendukung-pendukung utama dari teori konflik sering kali dikaitkan dengan sejumlah ilmuwan sosial terkenal seperti yang berasal dari Frankfurt School (Horkheimer, Adorno, Fromm, Marcuse, Habermas, Wright Mills) dan beberapa ilmuwan sosial lainnya seperti Ralf Dahrendorf, Lewis Coser, dan Randal Collins. Sekalipun mereka menguraikan banyak hal yang berbeda namun hampir semuanya sepakat dalam hal bahwa konflik disebabkan oleh kepentingan yang berbeda-beda di antara segmen-segmen tertentu di dalam masyarakat.

Berpedoman pada analisis teori konflik itu kita bisa dengan gampang mengatakan bahwa kerusuhan yang terjadi di berbagai tempat di Indonesia disebabkan oleh kepentingan yang berbeda-beda di antara kelompok-kelompok yang berbeda-beda. Dalam konflik di Aceh dan Papua, misalnya, kerusuhan dan konflik berdarah terjadi karena perbedaan kepentingan antara kelompok pusat dan daerah. Pemerintah Pusat menghendaki sentralisasi sedangkan daerah menghendaki desentralisasi atau otonomi.

³⁷ R.A. Wallace and A. Wolf, *Contemporary Sociological Theory* (Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1980) pp. 81-82.

Dalam konflik di Sampit ada perbedaan kepentingan pusat daerah. Pemerintah pusat menghendaki sebagian besar penduduk Jawa-Madura dipindahkan keluar Jawa melalui program transmigrasi. Sedangkan pemerintah daerah tidak terlalu antusias menerima program itu karena hal itu akan mengurangi sumber kehidupan mereka. Dalam pelaksanaan politiknya, pemerintah pusat yang boleh dianggap sebagai kelompok elit yang berkuasa sering kali menggunakan pendekatan keamanan dengan menggunakan jasa para tentara. Itu sebabnya ada DOM di Aceh dan penempatan banyak tentara di Irian.

Sedangkan di dalam konflik atau kerusuhan yang bernuansa agama seperti di Maluku, Poso, atau tragedi berdarah malam natal tahun 2000, dan lain-lain kelihatannya hakikat dari agama yang berwajah ganda dipergunakan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan-tujuan kelompoknya. Hal itu bisa dibuktikan oleh pernyataan beberapa tokoh, seperti K.H. Hasyim Muzadi, Ketua Umum PBNU yang dalam Seminar Pertumbuhan Gereja Nasional pada 21 November 2000 mengatakan: "Hati-hati! Konflik Elite Politik menggunakan tema agama dan umat beragama".³⁸ Hal yang senada diungkapkan oleh K.H. Ali M. Musah, ketua NU Jawa Timur. Dia mengatakan bahwa pertentangan antara umat beragama seperti yang terjadi di Ambon dan daerah-daerah lain sebenarnya bukan terjadi di antara umat beragama tetapi antara para elite politik. Menurut dia, sekarang banyak orang yang mencari kekuasaan politik dengan mengatasnamakan agama.³⁹

³⁸ *TABLOID ROHANI POPULER SABDA*, Edisi No.11/Tahun III/Desember 2000 p. 5.

³⁹ *Ibid.*

Rupanya apa yang dikatakan oleh kedua tokoh Islam itu tidak berlebihan. Hal itu terbukti dari kenyataan lainnya yakni bahwa sebelumnya jarang sekali terjadi konflik-konflik berdarah atas nama agama. Tetapi menjelang keruntuhan Orde Baru yang berlanjut sampai pada masa ini banyak terjadi konflik berdarah karena agama. Alasannya ialah karena ada kelompok-kelompok tertentu, khususnya kelompok-kelompok elit di dalam masyarakat, yang menggunakan agama untuk kepentingan dan ambisi-ambisi pribadi.

Tetapi patut dicatat bahwa konflik juga mempunyai fungsi-fungsi positif. Lewis Coser sebagaimana dijelaskan oleh Turner⁴⁰ menekankan fungsi konflik untuk mempertahankan keutuhan masyarakat. Coser menguraikan ide-idenya secara cemerlang di dalam bukunya yang berjudul *The functions of Social Conflict*.⁴¹ Dalam arti tertentu konflik dengan kelompok lain bisa memperkuat solidaritas di dalam kelompok yang agak longgar. Itulah sebabnya pada masa Orde Lama, Presiden Soekarno menciptakan musuh-musuh bersama seperti Malaysia atau pada masa Order Baru Soeharto menciptakan musuh-musuh bersama dengan memberikan label-label PKI, GPK, subversif kepada orang-orang yang bertentangan dengan pemerintah. Konflik yang kini sedang terjadi di Indonesia dapat memperkuat kesatuan negara Indonesia kalau ditangani secara baik. Paling kurang sesudah mengatasi konflik-konflik itu, rakyat Indonesia tidak lagi merasakan kesatuan itu sebagai sesuatu yang *taken for granted* melainkan sebagai sesuatu yang diperjuangkan dan selalu dipertahankan secara terus-menerus.

⁴⁰ Jonathan Turner, *op.cit.* hlm. 159.

⁴¹ Lewis Coser, *The functions of Social Conflict* New York: Free Press, 1956).

4. Jalan Keluar Yang Ditempuh

Pemerintahan Reformasi sudah berusia hampir tiga tahun. Dalam kurun waktu yang tiga tahun itu kerusuhan dan konflik berdarah bukannya berakhir tetapi malahan meningkat baik dalam jumlah maupun di dalam intensitasnya. Persoalan tentang mengapa kerusuhan dan konflik berdarah masih tetap terjadi rupanya sudah bisa dijawab oleh analisis fungsionalisme struktural yang menemukan alasannya pada ketidakberfungsian (disfungsi) dari elemen-elemen tertentu di dalam masyarakat (politik, ekonomi, agama, pemerintahan) dan analisis teori konflik yang menemukan sebabnya pada perbedaan kepentingan antara berbagai kelompok di dalam masyarakat sehingga kelompok yang satu mau menguasai kelompok yang lain. Tetapi persoalan lainnya ialah apakah yang telah dibuat oleh komponen-komponen bangsa Indonesia khususnya institusi pemerintahan dan institusi agama guna meredakan atau menghilangkan konflik-konflik itu?

Secara sepintas lalu kita telah melihat berbagai usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi atau meredakan konflik-konflik yang ada. Usaha-usaha itu bisa dikategorikan ke dalam dua kelompok, yakni jalan keluar yang bersifat darurat dan jalan keluar yang lebih bersifat fundamental.

4.1. Jalan Keluar Yang Bersifat Darurat

Jalan keluar yang bersifat darurat adalah jalan keluar yang ditempuh pemerintah untuk mengatasi konflik berdarah atau kerusuhan yang sedang berlangsung tetapi belum tentu mengikis akar-akar dari konflik itu. Konflik bisa saja reda untuk waktu tertentu tetapi sewaktu-waktu bisa timbul kembali. Contoh-contoh dari usaha yang telah dijalankan oleh Pemerintah itu adalah:

- Mengirimkan sejumlah tentara atau polisi untuk mengamankan keadaan. Hal ini dapat dipandang sebagai cara mengatasi persoalan yang bersifat darurat karena pengiriman tentara sama sekali tidak menghilangkan akar masalah. Pengiriman pasukan ke daerah-daerah yang dilanda kerusuhan adalah ibarat memadamkan nyala api di permukaan tetapi baranya masih tetap ada. Dalam beberapa kasus, seperti di Aceh dan Timtim pengiriman tentara malah memperkeruh keadaan. Kehadiran tentara yang terlalu banyak membuat orang merasa panik dan tidak aman. Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa pendekatan yang cenderung represif dan militeristik selalu membawa dampak yang lebih buruk karena di mana ada banyak tentara di situ ada banyak keributan dan pelanggaran HAM seperti halnya di Timtim, Aceh, atau Irian Jaya.
- Mengupayakan dialog di antara kelompok-kelompok yang bertikai, seperti kelompok-kelompok yang bertikai di Ambon atau Sampit. Dialog-dialog ini biasanya terjadi di antara para pemimpin dari masing-masing kelompok yang bertikai. Tetapi masalahnya ialah hasil dialog ini sulit disosialisasikan sampai ke lapisan bawah yang sedang bertikai. Para tokoh masyarakat Maluku yang berasal dari berbagai agama boleh berdialog di Jakarta tetapi kerusuhan tetap berjalan terus di Maluku. Demikian juga dialog antara kelompok-kelompok yang bertikai di Sampit. Dengan kata lain, dialog di kalangan atas saja belum tentu menyelesaikan persoalan.
- Mengungsikan kelompok-kelompok minoritas yang terbanyak menjadi korban dalam kerusuhan etnik seperti yang terjadi di Sambas atau Sampit di mana puluhan ribu orang Madura kembali ke tempat asalnya atau kerusuhan di Maluku Utara di mana banyak orang Kristen yang mengungsi ke

Sulawesi utara dan NTT. Tetapi jalan keluar seperti ini betul-betul bersifat darurat karena pengungsian membawa masalah tersendiri bukan saja bagi pemerintah tetapi juga bagi masyarakat sekitarnya.

- Mengusahakan dialog atau perundingan yang intensif antara pemerintah pusat dan provinsi-provinsi yang ingin melepaskan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia, seperti Aceh dan Papua. Perundingan yang intensif antara wakil-wakil pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka telah menghasilkan *jedah kemanusiaan* yang relatif mempunyai dampak positif untuk masyarakat Aceh. Demikianpun dialog antara delegasi Dewan Presidium Papua dengan presiden Abdurrahman Wahid pada tanggal 4 Juli 2000 yang mengizinkan masyarakat Papua untuk menyatakan identitas kulturalnya seperti menggantikan nama Irian Jaya dengan Papua dan mengisinkan mereka mengibarkan *bendera bintang kejora* dalam ukuran yang lebih kecil dari *bendera merah putih*.⁴² Tetapi beberapa bulan kemudian kerusuhan muncul lagi karena tentara secara paksa menurunkan bendera bintang kejora dan mendapat perlawanan masyarakat Papua.
- Mengusahakan pertemuan langsung antara massa yang bertikai dengan presiden atau wakil presiden. Kunjungan-kunjungan seperti itu sudah dilakukan oleh Presiden Gus Dur untuk masyarakat Aceh dan Irian Jaya dan oleh wakil presiden Megawati Soekarno Putri untuk Aceh, Papua, dan Kalimantan Tengah. Kunjungan-kunjungan seperti itu tentu saja berguna untuk mendengar secara langsung aspirasi dari

⁴² Frans Maniagasi, "Dialog Masalah Papua" dalam *TEMPO*, 16 Juli 2000, p. 75.

bawah yang bisa dipergunakan dalam mengambil kebijaksanaan selanjutnya untuk mengatasi persoalan-persoalan itu.

- Menghukum para pelaku tindak kejahatan yang menyebabkan kerusuhan dan konflik berdarah atau yang sering kali disebut dalang kerusuhan atau 'provokator'. Hampir dalam setiap kasus kerusuhan ditemukan orang-orang yang dianggap sebagai dalang atau pencetus kerusuhan. Tetapi usaha seperti ini lebih terkesan seperti *sandiwara* untuk memberi kesan kepada penonton atau masyarakat luas bahwa pemerintah atau pihak keamanan telah sungguh-sungguh berusaha untuk mengatasi masalah-masalah konflik berdarah itu. Soalnya mereka yang ditangkap itu adalah cuma pesuruh-pesuruh. Sedangkan pelaku-pelaku tindak kejahatan sesungguhnya yang meledakkan bom pada malam natal di Jakarta dan kota-kota lainnya tak pernah disentuh dan tetap aman-aman saja. Pemboman pada waktu yang sama dengan sasaran yang sama pada tempat yang berbeda-beda mestinya telah diorganisir secara rapi oleh seseorang atau sekelompok orang tertentu.

4.2. Jalan Keluar Yang Bersifat Fundamental

Jalan keluar yang bersifat fundamental mestinya dicari pada melenyapkan hal-hal yang menimbulkan konflik berdarah di Indonesia. Berdasarkan analisis teori fungsionalisme struktural dan teori konflik, penyebab konflik dan kerusuhan di Indonesia adalah disfungsi institusi-institusi sosial yang membentuk masyarakat Indonesia dan pergolakan karena kepentingan yang berbeda-beda di antara segmen-segmen yang berbeda-beda di dalam masyarakat. Disfungsi institusi-institusi sosial seperti politik, hukum, ekonomi, agama, pemerintahan, pendidikan, atau budaya lebih berhubungan dengan sistem. Oleh karena itu, jalan keluar

yang lebih bersifat fundamental harus dicari pada usaha membenahi sistem yang memungkinkan setiap institusi-institusi sosial yang membentuk masyarakat itu bisa fungsional atau berfungsi dengan baik.

Selama ini usaha pemerintah untuk mencari jalan keluar yang lebih bersifat fundamental masih tersendat-sendat. Mungkin salah satu langkah besar yang telah ditempuh oleh pemerintah untuk mengatasi konflik di Indonesia ialah dengan memberikan otonomi kepada daerah-daerah. Dengan pemberian otonomi itu diharapkan bahwa daerah-daerah yang ingin melepaskan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia lebih leluasa mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan kekhasannya sendiri. Tetapi pemberian otonomi daerah itu tidak boleh dianggap sebagai obat yang paling mujarab dalam mengatasi konflik-konflik di Indonesia. Kesulitannya ialah bahwa konflik-konflik di Indonesia tidak semata-mata disebabkan oleh ketidakpuasan daerah terhadap pemerintah pusat melainkan disebabkan oleh banyak hal. Dengan kata lain, akar dari konflik-konflik di Indonesia bukan cuma satu sehingga barang kali tidak bisa disebut lagi sebagai akar karena segala persoalan itu saling berhubungan.

Mungkin jalan keluar yang bisa ditempuh untuk keluar dari konflik-konflik berdarah yang kini tengah melanda Indonesia ialah pemberfungsian institusi-institusi sosial atau elemen-elemen pembentuk masyarakat Indonesia secara simultan. Dengan kata lain, setiap institusi sosial yang membentuk masyarakat Indonesia harus menjalankan fungsinya dengan baik, seperti:

- Institusi politik harus menjalankan fungsinya secara baik dalam arti ia harus menerapkan suatu sistem pemerintahan yang sungguh-sungguh bersifat demokratis. Menurut Ignas Kleden, demokrasi tetap merupakan sistem terbaik karena dia tidak meniadakan kelemahan manusia dan keteledoran

masyarakat tetapi memberi kemungkinan bahwa kelemahan-kelemahan itu dapat diperbaiki oleh kontrol yang terus-menerus dan keteledoran dapat dikurangi dengan peringatan yang terus-menerus.⁴³

- Institusi ekonomi harus menjalankan fungsinya dengan baik. Hal ini bisa dilakukan dengan menerapkan suatu sistem ekonomi yang bermoral, yakni ekonomi yang mengharamkan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, institusi ekonomi juga dapat melaksanakan fungsinya dengan baik kalau kebijaksanaan ekonomi tidak cuma menekankan pertumbuhan ekonomi tetapi juga pemerataan hasil-hasilnya. Dalam hal ini kerja sama antara ahli-ahli ekonomi dengan para pemegang kekuasaan (pemerintah) menjadi sangat penting.
- Institusi hukum dapat berfungsi dengan baik kalau lembaga kehakiman sungguh-sungguh bisa menghukum orang-orang yang bersalah dan bukan sebaliknya yang benar disingkirkan dan yang salah dipertahankan. Guna menjalankan fungsinya secara maksimal, lembaga kehakiman harus membersihkan dirinya dari praktek “mafia” yang memenangkan perkara bukan lagi atas dasar objektivitas melainkan atas pertimbangan-pertimbangan lainnya.
- Institusi agama dapat menjalankan fungsinya secara baik kalau ia berhasil mengajarkan pemeluk-pemeluknya untuk bertingkah laku sesuai dengan ajaran-ajaran agamanya, khususnya agama yang selalu mengajarkan nilai-nilai, norma-norma, dan hukum-hukum yang terarah kepada kebaikan. Dengan kata lain, agama harus mampu menjadikan dirinya

⁴³ Ignas Kleden, “Krisis dan Radikalisme Pelipur Lara” dalam *TEMPO*, 20 Agustus 2000, p. 65.

sebagai *dominant culture* untuk para pemeluknya. Artinya dalam bertingkah laku orang harus selalu mempertimbangkan ajaran-ajaran agamanya. Selain itu, agama juga harus lebih terbuka. Dia tidak boleh menganggap dirinya sebagai yang memonopoli kebenaran. Dia harus juga berani untuk mengakui bahwa kebenaran juga terdapat dalam agama-agama lain sehingga para pemeluknya tidak terlalu fanatik dan militan.

- Institusi pendidikan bisa menjalankan fungsinya dengan baik kalau ia berhasil mendidik warga masyarakat menjadi orang yang integritas kepribadiannya cukup tinggi atau orang yang bermoral tinggi. Orang yang bermoral tinggi berarti orang yang bisa membedakan mana yang baik dan jahat serta melakukan yang baik dan mengelakkan yang jahat.
- Institusi keluarga dapat menjalankan fungsinya yang baik kalau ia – sama seperti institusi pendidikan – mendidik anggota-anggota keluarganya menjadi orang yang bermoral, yakni orang yang tahu membedakan mana yang baik dan jahat serta berbuat mengikuti suara hatinya. Sebagaimana diketahui latar belakang keluarga mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam perkembangan seorang manusia. Studi-studi dari psikologi sosial telah menunjukkan hal itu. Karena itu, keluarga sebetulnya juga memainkan peranan penting dalam mengatasi konflik-konflik sosial.
- Institusi budaya dapat menjalankan fungsinya dengan baik kalau ia berhasil mensosialisasikan nilai-nilai budaya ke dalam diri para warganya dan menjauhkan diri dari sikap ethno-sentrisme budaya yang menganggap kebudayaan sendiri lebih baik atau lebih tinggi dari kebudayaan lain. Berakar dalam kebudayaan sendiri dan keterbukaan terhadap kebudayaan lain adalah dua hal yang sama pentingnya. Dengan demikian

orang tidak cepat terjebak dalam *prejudice-prejudice* yang tidak berdasar.

Mencari jalan keluar dari konflik-konflik berdarah di Indonesia tentu tidak cukup dengan membenahi sistem. Apa lagi kalau dilihat bahwa pembenahan sistem bukanlah suatu pekerjaan yang mudah mengingat ada begitu banyak hal yang terkait di dalamnya. Oleh karena itu, selain membenahi sistem maka hal lain yang perlu dilakukan ialah memberfungsikan orang-orang yang sungguh-sungguh berkompeten, jujur, dan bermoral dalam menyelenggarakan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal ini menjadi penting karena pembenahan sistem hanya bisa dilakukan oleh manusia-manusia. Karena itu, kedua hal itu harus sejalan, yakni pembenahan sistem dan pemberdayaan manusia-manusia.

5. Penutup

Dalam tiga tahun terakhir ini kerusuhan dan konflik berdarah Indonesia bukannya berkurang seiring dan berjalannya roda pemerintahan yang bersifat demokratis tetapi malah meningkat. Peningkatan itu tidak saja terjadi dalam intensitasnya tetapi juga dalam penyebarannya. Hampir setiap pulau besar atau kecil di Indonesia pernah dilanda kerusuhan dan konflik berdarah. Jenis-jenis konflik pun bervariasi. Ada konflik yang bernuansa agama, seperti di Ambon atau Poso. Ada konflik politis seperti terjadi di Aceh dan Papua. Kemudian ada konflik karena pertentangan etnis seperti di Sambas atau Sampit di Kalimantan.

Dalam menganalisis sebab-sebab dari konflik-konflik berdarah itu telah digunakan perspektif-perspektif sosiologis, khususnya dua teori yang bernaung di bawah paradigma fakta sosial, yakni teori fungsionalisme struktural dan teori konflik. Kedua

orang tidak cepat terjebak dalam *prejudice-prejudice* yang tidak berdasar.

Mencari jalan keluar dari konflik-konflik berdarah di Indonesia tentu tidak cukup dengan membenahi sistem. Apa lagi kalau dilihat bahwa pembenahan sistem bukanlah suatu pekerjaan yang mudah mengingat ada begitu banyak hal yang terkait di dalamnya. Oleh karena itu, selain membenahi sistem maka hal lain yang perlu dilakukan ialah memberfungsikan orang-orang yang sungguh-sungguh berkompeten, jujur, dan bermoral dalam menyelenggarakan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal ini menjadi penting karena pembenahan sistem hanya bisa dilakukan oleh manusia-manusia. Karena itu, kedua hal itu harus sejalan, yakni pembenahan sistem dan pemberdayaan manusia-manusia.

5. Penutup

Dalam tiga tahun terakhir ini kerusuhan dan konflik berdarah Indonesia bukannya berkurang seiring dan berjalannya roda pemerintahan yang bersifat demokratis tetapi malah meningkat. Peningkatan itu tidak saja terjadi dalam intensitasnya tetapi juga dalam penyebarannya. Hampir setiap pulau besar atau kecil di Indonesia pernah dilanda kerusuhan dan konflik berdarah. Jenis-jenis konflik pun bervariasi. Ada konflik yang bernuansa agama, seperti di Ambon atau Poso. Ada konflik politis seperti terjadi di Aceh dan Papua. Kemudian ada konflik karena pertentangan etnis seperti di Sambas atau Sampit di Kalimantan.

Dalam menganalisis sebab-sebab dari konflik-konflik berdarah itu telah digunakan perspektif-perspektif sosiologis, khususnya dua teori yang bernaung di bawah paradigma fakta sosial, yakni teori fungsionalisme struktural dan teori konflik. Kedua